



LEMBAR FAKTA :

**TERKAIT 'LARANGAN'
UNI EROPA
TERHADAP BAHAN
BAKAR NABATI DARI
MINYAK KELAPA
SAWIT**

MEI 2018

Ada apa dengan Uni Eropa dan bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit?

1. Pada 17 Januari 2018 lalu, Parlemen Eropa melakukan pemungutan suara terkait revisi terhadap **Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (Renewable Energy Directive atau RED)** yang salah satu keputusannya adalah usulan untuk menghilangkan kontribusi bahan bakar nabati (BBN) berbasis dasar minyak kelapa sawit dalam perhitungan kotor akhir konsumsi energi terbarukan negara-negara anggota Uni Eropa pada 2021¹ dan dengan demikian mencabut subsidi energi terbarukan untuk BBN dari minyak sawit. Keputusan Parlemen Eropa ini bukanlah keputusan final UE karena masih harus didialogkan dan disepakati oleh kedua organ pengambil keputusan lainnya, yaitu Komisi Eropa dan Dewan Uni Eropa.
2. Pemerintah dan industri kelapa sawit Indonesia bereaksi keras terhadap usulan Parlemen Eropa tersebut². Sementara itu, liputan di media massa tidak sepenuhnya akurat mengenai usulan ini, bahkan ada yang cenderung mengarahkan publik untuk meyakini bahwa UE akan melarang impor biofuel dan minyak kelapa sawit (*crude palm oil/CPO*) dari Indonesia beserta seluruh produk turunannya. Dalam kesimpangsiuran tersebut, permasalahan tata kelola yang telah menyebabkan ketidakpatuhan pajak, penggundulan hutan, perampasan lahan, dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat dan lokal, buruh, dan pekerja, seakan tenggelam tertelan narasi perang dagang dan 'ideologi anti-sawit'³ meskipun sesungguhnya benar-benar terjadi di lapangan.
3. Prihatin dengan kondisi tersebut, kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada perbaikan tata kelola sawit di Indonesia, melihat perlunya pelurusan dan penjernihan fakta agar publik mendapat informasi dan perspektif yang menyeluruh terkait isu ini demi mewujudkan industri sawit Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologis, serta demi memenuhi mandat Undang-Undang Dasar RI untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai hak asasi manusia.

Apa itu bahan bakar nabati?

4. Bahan Bakar Nabati (BBN/*biofuel*) adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain⁴. BBN dapat dibedakan menjadi BBN konvensional (generasi pertama) dan BBN lanjutan (generasi kedua dan ketiga). BBN konvensional dihasilkan dari tanaman pangan seperti gula, tepung, atau lemak nabati, yang juga digunakan untuk memberi makan manusia dan

¹ <https://www.reuters.com/article/malaysia-palmoil-eu/european-move-to-ban-palm-oil-from-bahan-bakar-hayatis-is-crop-apartheid-malaysia-idUSL3N1PD1NJ>. Diakses 30 April 2018.

² Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI, Retno L. P. Marsudi, menyebut keputusan ini sebagai 'kampanye negatif' dan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit serta mengancam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, melabeli keputusan ini sebagai 'perang dagang' dan meminta mandat untuk melancarkan balasan dengan menghentikan impor pesawat terbang dan salmon dari Uni Eropa dan Norwegia. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, secara khusus mengancam akan menghentikan pembelian *Airbus* dari Perancis apabila UE benar-benar melarang CPO dari Indonesia beserta produk-produk turunannya. Lihat misalnya <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180115060231-134-268799/eropa-akan-hapus-biodiesel-dari-sawit-termasuk-dari-indonesia>. Diakses 15 Januari 2018, ² <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180409135954-92-289446/ri-ancam-balas-pelarangan-impor-cpo-uni-eropa>. Diakses 11 April 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180411170733-92-290102/balas-larangan-impor-cpo-jk-ancam-setop-beli-airbus>. Diakses 11 April 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170509135906-92-213466/resolusi-sawit-uni-eropa-disinyalir-karena-persaingan-dagang>. Diakses 9 Mei 2017, <https://finance.detik.com/industri/d-3927728/norwegia-setop-biofuel-dari-sawit-ri-ancam-tak-impor-ikan-salmon>. Diakses 20 Maret 2018, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3924768/sawit-ri-dicekal-as-hingga-eropa-ketua-dpr-minta-kemendag-lawan>. Diakses 19 Maret 2018, <https://www.merdeka.com/uang/imbis-pelarangan-cpo-lion-air-group-boikot-impor-ratusan-airbus.html>. Diakses 12 April 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/26/174000626/asosiasi-petani--lawan-uni-eropa-dengan-boikot-dan-stop-ekspor-cpo>. Diakses 26 Januari 2018.

³ Pada 2 Juni 2018, Arif Havas Oegroseno, Duta Besar RI untuk Jerman, menulis artikel opini di Koran Kompas yang menyebutkan bahwa kritik berbagai NGO Indonesia terhadap industri sawit yang dimuat dalam Surat Terbuka kepada Presiden RI dan Dewan UE serta Kepala Negara UE mencerminkan ideologi anti-sawit yang telah "merambah" Indonesia. Surat Terbuka tersebut dapat dilihat di sini: <http://pusaka.or.id/2018/05/ratusan-pimpinan-organisasi-mengirimkan-surat-terbuka-kepada-presiden-ri-dan-presiden-dewan-uni-eropa-menyikapi-dampak-usaha-perkebunan-kelapa-sawit/>.

⁴ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 tahun 2008.

ternak. BBN generasi kedua dan ketiga dihasilkan dari bahan baku non-tanaman pangan dan pakan, misalnya sampah dan residu pertanian, tanaman yang tidak bisa dimakan, dan ganggang. BBN dipandang penting sebagai sumber energi terbarukan untuk menggantikan bahan bakar fosil dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk memerangi perubahan iklim karena pembakarannya dianggap menghasilkan lebih sedikit emisi dibandingkan bahan bakar fosil⁵. Namun, berbagai studi lanjutan mengungkapkan fakta bahwa penggunaan BBN konvensional (generasi pertama) justru secara keseluruhan lebih buruk dibandingkan bahan bakar fosil akibat alih fungsi lahan yang ditimbulkannya (Lihat Gambar 3).

Apa itu Arahan Energi Terbarukan UE?

5. Arahan Energi Terbarukan UE adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan UE yang memuat suatu target/tujuan/hasil yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota UE dalam kurun waktu tertentu. Namun, tidak seperti Regulasi UE yang otomatis mengikat seluruh negara anggotanya, Arahan (*Directive*) harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam aturan hukum masing-masing negara anggota UE, biasanya dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Arahan ini mengikat secara hukum dan apabila dilanggar, Komisi UE dapat mengawali sebuah prosedur pelanggaran formal terhadap negara yang melanggar⁶.
6. RED adalah pilar utama **kebijakan iklim** UE dan pertama kali dikeluarkan pada tahun 2009 untuk mendorong produksi dan penggunaan energi terbarukan di wilayah UE dalam rangka mengurangi emisi GRK⁷. Jadi, tujuan tertinggi RED adalah untuk memerangi perubahan iklim dan bukan yang lain. Berdasarkan RED, semua negara anggota UE harus memenuhi target penggunaan energi terbarukan sebesar 20% pada tahun 2020 dan 10% bahan bakar transportasi mereka harus berasal dari energi terbarukan.⁸ RED I hanya berlaku hingga 2020 dan oleh karenanya harus direvisi untuk memuat target hingga 2030.
7. Sejak tahun 2009, UE telah mengkaji ulang target penggunaan BBN konvensional atau generasi pertama karena khawatir pada dampaknya terhadap iklim dan keanekaragaman hayati. Pada bulan April 2015, UE mengeluarkan keputusan untuk membatasi penggunaan energi terbarukan dari BBN generasi pertama menjadi 7% dari total konsumsi energi untuk transportasi pada tahun 2020. Selain itu, negara-negara anggota UE juga harus melaporkan target nasional penggunaan BBN lanjutan⁹. Keputusan ini dikeluarkan agar tidak menimbulkan tekanan baru pada lahan.
8. Sesuai dengan peningkatan ambisi pengurangan emisi global pasca disepakatinya Persetujuan Paris, pada tanggal 30 November 2016, Komisi Eropa mengusulkan agar RED direvisi dengan target baru pada 2030 bahwa paling sedikit 27% dari total konsumsi energi UE pada tahun 2030 berasal dari energi terbarukan¹⁰. Parlemen Eropa mengusulkan target energi terbarukan yang lebih ambisius, yaitu paling sedikit 35% pada tahun 2030, dengan 12% bahan bakar transportasi harus berasal dari energi terbarukan¹¹.

Apa kata Arahan Energi Terbarukan UE ini soal BBN dari minyak kelapa sawit?

9. BBN dan minyak sawit hanyalah sebagian kecil dari paket kebijakan RED. Dalam posisinya terhadap isu ini, Parlemen Eropa pada Januari 2018 mengusulkan agar

⁵ Termasuk emisi CO, CO₂, SO, HC, dan PM http://cdn.intechopen.com/pdfs/42164/InTech-Vehicle_emissions_what_will_change_with_use_of_biofuel.pdf. Diakses 8 Mei 2018.

⁶ https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_en. Diakses 5 Mei 2018.

⁷ <https://www.transportenvironment.org/newsroom/blog/will-eu-call-palm-oil-nations%E2%80%99-bluff>. Diakses 8 Mei 2018.

⁸ <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive>. Diakses 5 Mei 2018.

⁹ http://climateobserver.org/wp-content/uploads/2015/04/EP_press-release-on-biofuels-2015.pdf. Diakses 8 Mei 2018.

¹⁰ <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive>. Diakses 5 Mei 2018.

¹¹ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0009>. Amandemen 324 Recital 7. Diakses 7 Mei 2018.

kontribusi BBN generasi pertama (tidak hanya minyak sawit tapi semua minyak nabati berbasis pangan) tidak ditingkatkan melainkan tetap pada tingkatan tahun 2017 dengan batas atas sebesar 7% dari konsumsi akhir energi kotor di sektor transportasi (*rail and road*). Khusus BBN dari minyak sawit untuk transportasi, listrik, dan pemanas, Parlemen Eropa mengusulkan agar tidak lagi diikutsertakan dalam perhitungan konsumsi akhir energi kotor dari energi terbarukan pada tahun 2021¹² dan demikian tidak lagi *eligible* untuk menerima subsidi energi terbarukan. Komisi Uni Eropa (*EU Commission*) dan Dewan Uni Eropa (*Council of the EU*) belum tentu menyetujui usulan Parlemen Eropa ini karena mereka memiliki pandangan dan posisi yang berbeda. Komisi Uni Eropa mengusulkan agar kontribusi BBN minyak sawit dalam perhitungan energi terbarukan tidak dihilangkan, melainkan tetap berada di tingkatan 7% hingga tahun 2020 dan dikurangi secara bertahap hingga 3,8% saja pada tahun 2030.¹³ Sementara itu, posisi Dewan UE adalah tetap di tingkatan 7%.¹⁴

10. Perlu diingat pula bahwa UE telah menetapkan kriteria keberlanjutan yang ketat untuk semua BBN generasi pertama (termasuk dari minyak sawit) agar dapat dihitung sebagai energi terbarukan. Yang pertama, harus ada penurunan emisi GRK sebesar 35% dibanding bahan bakar fosil (2009). Angka ini meningkat menjadi 50% pada 2017 dan lalu meningkat menjadi 60% pada 2018 namun khusus untuk pabrik baru. Yang kedua, bahan baku BBN ini tidak boleh berasal dari lahan yang memiliki stok karbon tinggi, seperti lahan basah (termasuk gambut) dan hutan. Yang ketiga, bahan bakunya tidak boleh berasal dari lahan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti hutan primer dan *grassland* dengan keanekaragaman hayati yang tinggi¹⁵.

Apakah Arahan Energi Terbarukan UE akan melarang CPO beserta produk-produk turunannya?

11. **Tidak.** Arahan ini tidak akan melarang impor maupun penggunaan bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit di UE, baik untuk bahan bakar maupun pembangkit tenaga listrik, apalagi untuk kepentingan pangan dan industri yang tidak disebut dalam kebijakan ini. Minyak kelapa sawit akan tetap boleh digunakan sebagai bahan bakar, pembangkit listrik, dan pemanas, namun tidak dapat lagi dihitung sebagai penggunaan energi terbarukan¹⁶ dan oleh karenanya tidak bisa mendapatkan insentif (subsidi) energi terbarukan seperti keringanan pajak, bantuan penelitian, investasi, sertifikat hijau, atau harga premium, yang diberikan untuk mendorong penggunaan energi yang dapat mengurangi GRK.
12. Sebelumnya, Parlemen Eropa juga telah mengeluarkan sebuah Resolusi yang tidak mengikat secara hukum pada bulan April 2017, yang isinya menyerukan kepada Komisi Eropa untuk mengambil langkah-langkah untuk menihilkan penggunaan bahan bakar nabati yang mengakibatkan deforestasi pada 2020 (termasuk namun tidak terbatas pada minyak kelapa sawit). Namun, Komisi Eropa belum mengambil langkah apapun mengenai hal ini. Sementara itu, Uni Eropa mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan faktor keberlanjutan pada industri ini dengan adanya standar yang jelas dan penerapannya¹⁷. Dengan demikian, berbagai pemberitaan di media massa¹⁸ yang menyatakan bahwa UE akan melarang bahan bakar nabati

¹² <http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1519347&t=e&l=en>. Diakses 5 Mei 2018.

¹³ https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/RED%20II_ICCT_Policy-Update_vF_jan2017.pdf. Diakses 7 Juni 2018.

¹⁴ <http://www.caneurope.org/publications/blogs/1553-all-you-need-to-know-about-the-last-phase-of-the-renewable-energy-directive-negotiations>. Diakses 7 Juni 2018.

¹⁵ <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/sustainability-criteria>. Diakses 8 Mei 2018.

¹⁶ https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20180424_red2_fact_sheet_id.pdf Diakses 31 Mei 2018.

¹⁷ https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20180424_palm_oil_fact_sheet_en.pdf. Diakses 7 Mei 2018.

¹⁸ Misalnya berita CNN tentang "pelarangan impor CPO" di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180409135954-92-289446/ri-ancam-balas-pelarangan-impor-cpo-uni-eropa>, [berita kompas.com tentang "pelarangan sawit untuk bahan baku biodiesel" di https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/150600426/luhut-pimpin-diplomasi-untuk-lobi-uni-eropa-soal-pelarangan-sawit](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/150600426/luhut-pimpin-diplomasi-untuk-lobi-uni-eropa-soal-pelarangan-sawit), [wartaekonomi.co.id tentang "phasing out biodiesel dari sawit" di https://www.wartaekonomi.co.id/read/177519/parlemen-eropa-diminta-perhatikan-sawit-indonesia.html](https://www.wartaekonomi.co.id/read/177519/parlemen-eropa-diminta-perhatikan-sawit-indonesia.html).

dari minyak kelapa sawit dan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia memuat informasi yang salah dan berpotensi memicu emosi maupun kesalahpahaman berbagai pihak.

Mengapa Parlemen Eropa ingin mencabut subsidi energi terbarukan bagi BBN dari minyak kelapa sawit pada 2021?

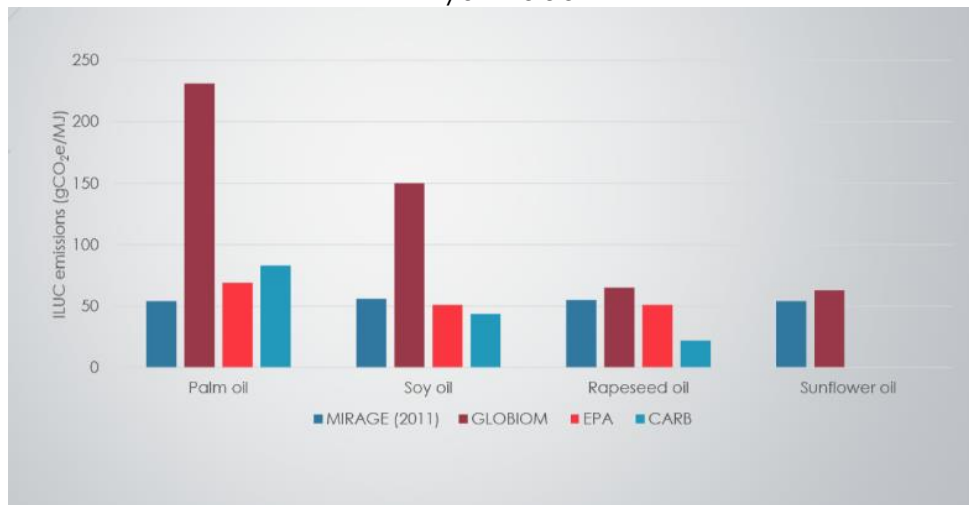
13. Uni Eropa (sebagaimana pula Indonesia) memiliki kewajiban hukum untuk mengurangi emisi GRK¹⁹, salah satunya melalui penggunaan energi terbarukan. Dari hasil penelitian dan penyelidikan yang dilakukan UE, ditemukan bahwa penggunaan bahan bakar nabati generasi pertama yang dihasilkan dari seluruh tanaman pangan dan pakan (tidak hanya sawit) berpotensi mendorong perubahan penggunaan lahan tidak langsung (*indirect land use change*) atau ILUC yang justru melepaskan emisi lebih banyak dibandingkan bahan bakar fosil yang digantikannya. ILUC adalah meningkatnya penggunaan/alih fungsi lahan di tempat lain, termasuk di hutan dan lahan gambut serta lahan-lahan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, untuk menggantikan suplai tanaman pangan dan pakan yang dijadikan bahan baku BBN²⁰. Dengan demikian, penggunaan BBN generasi pertama yang ditujukan untuk mengurangi emisi GRK justru melemahkan tujuannya sendiri. Oleh karenanya, UE ingin mengurangi penggunaan BBN generasi pertama dan mendorong produksi serta penggunaan bahan bakar nabati lanjutan (*advanced biofuel*) yang tidak berasal dari tanaman pangan maupun pakan.
14. Mengapa minyak kelapa sawit dibicarakan secara khusus? Perlu diingat bahwa RED tidak hanya berbicara tentang minyak kelapa sawit, tetapi juga ingin membatasi penggunaan BBN dari **keseluruhan tanaman pangan dan pakan** (termasuk kedelai, rapeseed, jagung, dsb.). Menurut studi Globiom (2016) yang dibuat atas permintaan Komisi Eropa, emisi GRK dari penggunaan BBN generasi pertama untuk transportasi ternyata lebih tinggi 1,8 kali lipat daripada emisi bahan bakar fosil jika kita memperhitungkan emisi dari keseluruhan siklus hidup, termasuk emisi langsung dari penanaman, pemrosesan, distribusi, dan perubahan penggunaan lahan serta emisi dari ILUC. Minyak kelapa sawit disebutkan secara khusus karena emisi GRK dari penggunaan biodiesel sawit diperkirakan lebih tinggi 3 kali lipat dibandingkan emisi dari bahan bakar fosil, jauh lebih tinggi dibandingkan emisi dari biodiesel kedelai dan rapeseed²¹. Jadi, meskipun produktivitas per hektar sawit jauh lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya, faktor ILUC sawit membuat emisi GRK dari biodiesel sawit lebih buruk dibandingkan bahan bakar fosil dan minyak nabati lainnya (Lihat Gambar 1). Dengan demikian, mensubsidi produksi dan penggunaan BBN dari minyak kelapa sawit dalam rangka pengurangan emisi GRK menjadi tidak masuk akal. Terlepas dari dimensi perang dagang yang digaungkan, kita perlu memahami bahwa kebijakan UE ini berakar pada kebijakan iklim sehingga faktor pengurangan GRK menjadi pertimbangan utama bagi mereka.

¹⁹ Pada 31 Mei 2002, Uni Eropa dan seluruh negara anggotanya meratifikasi Protokol Kyoto dengan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 8% pada periode komitmen pertama (1998-2002) dan 20% pada periode komitmen kedua (2013-2020). Setelah meratifikasi Perjanjian Paris pada 7 Oktober 2016, EU berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 40% di bawah tingkat emisi GHG tahun 1990 pada 2030. Lihat ec.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-43_en.htm, <https://climateactiontracker.org/countries/eu/>, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/kyoto_2_en. Diakses 2 Juni 2018.

²⁰ <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/land-use-change>. Diakses 8 Mei 2018.

²¹ <https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016%2004%20Globiom%20webinar.pdf>. Diakses 8 Mei 2018.

Gambar 1. Emisi dari perubahan penggunaan lahan tidak langsung dari berbagai minyak nabati



Sumber: Malins (2018)

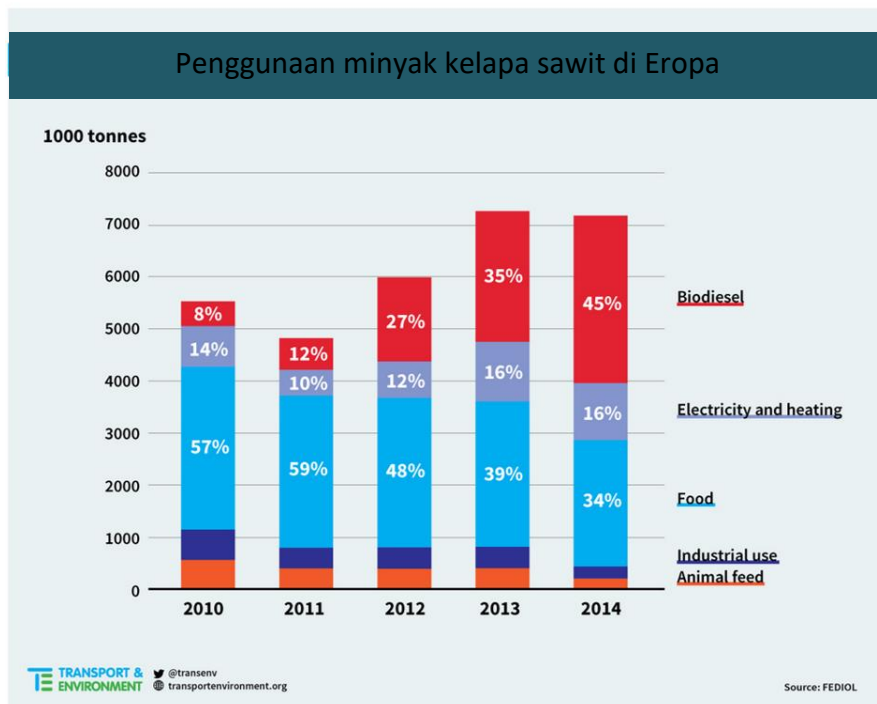
Apa dampak kebijakan *biofuel* Uni Eropa terhadap permintaan akan minyak kelapa sawit?

15. Kebijakan *biofuel* UE telah mendorong peningkatan konsumsi dan permintaan minyak kelapa sawit secara global. Berdasarkan data dari *US Department of Agriculture*²², volume impor minyak kelapa sawit UE meningkat dari 2,9 juta ton menjadi 6,5 juta ton pada periode 2000-2017. Khususnya setelah Arahan Energi Terbaru 2009 diberlakukan, impor minyak kelapa sawit UE tumbuh sebesar 21% pada periode 2010-2017. Data dari FEDIOL (diolah oleh Transport & Environment) menunjukkan bahwa penggunaan minyak kelapa sawit sebagai campuran solar di UE meningkat enam kali lipat pada periode 2010-2014 dan konsumsi biodiesel UE meningkat 34%²³. Pada tahun 2014, lebih dari setengah minyak kelapa sawit di UE (61%) digunakan untuk energi (bahan bakar dan listrik), lebih besar daripada minyak kelapa sawit yang digunakan untuk industri dan makanan digabungkan. Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa setelah ada kebijakan bahan bakar nabati UE, **penggunaan minyak kelapa sawit untuk energi semakin menggeser penggunaan minyak kelapa sawit untuk makanan dan industri (lihat Gambar 2)**²⁴. Biodiesel semakin menggeser penggunaan minyak kelapa sawit untuk makanan dan industri, dari hanya 8% pada 2010 menjadi 45% pada 2014.

²² <https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eu&commodity=palm-oil&graph=imports>. Diakses 8 Mei 2018.

²³ <https://www.transportenvironment.org/press/cars-and-trucks-burn-almost-half-all-palm-oil-used-europe>. Diakses 8 Mei 2018.

²⁴ <https://www.transportenvironment.org/press/cars-and-trucks-burn-almost-half-all-palm-oil-used-europe>. Diakses 8 Mei 2018.



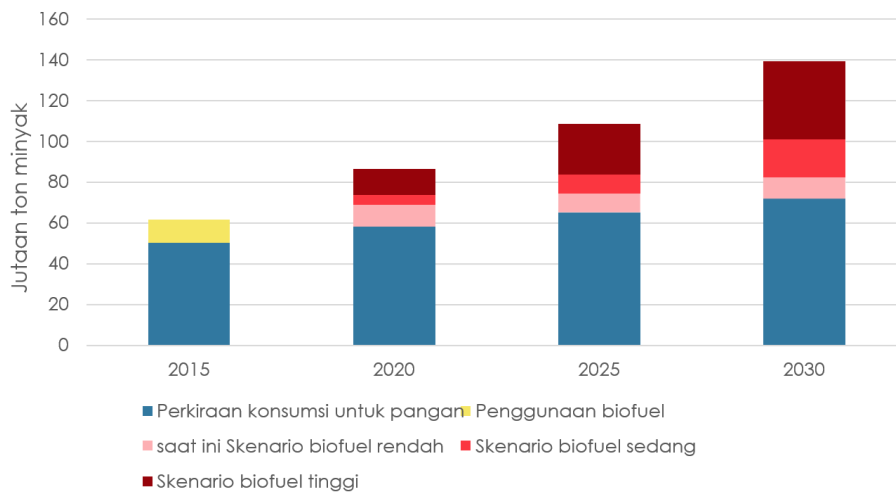
Gambar 2. Penggunaan minyak kelapa sawit di Eropa

Sumber: Transport&Environment, 2016

16. *Rainforest Foundation Norway* dan *Cerulogy* dalam laporannya “Driving Deforestation” (2018) memproyeksikan potensi permintaan langsung akan minyak kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan biodiesel di UE berdasarkan Arahan Energi Terbarukan. Apabila penggunaan bahan bakar nabati generasi pertama dibatasi menjadi 7% saja seperti yang saat ini diterapkan, **permintaan langsung** minyak kelapa sawit untuk biodiesel di UE diproyeksikan mencapai 3,3 juta ton pada 2020, 3,7 juta ton pada 2025, dan 4,1 juta ton pada 2030. Jika angka tersebut dibatasi menjadi 3,8% saja pada 2030 (seperti usulan Komisi Eropa), permintaan minyak kelapa sawit diperkirakan mencapai 3,1 juta ton pada 2020, namun akan berkurang menjadi 2,5 juta ton pada 2025 dan 1,8 juta ton saja pada 2030. Apabila usulan Parlemen Eropa untuk menghentikan dukungan terhadap penggunaan bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit pada 2021 disetujui, permintaan minyak kelapa sawit untuk biodiesel diperkirakan mencapai 2,9 juta ton pada 2020, namun kemudian berkurang menjadi 0,3 juta ton pada 2025 dan akan tetap berada di angka 0,3 juta ton pada 2030²⁵. Namun, perlu diingat bahwa angka-angka di atas adalah perkiraan permintaan langsung akan minyak kelapa sawit untuk biodiesel saja. Meskipun permintaan minyak kelapa sawit untuk bahan bakar transportasi bisa jadi menurun akibat revisi Arahan Energi Terbarukan UE, **permintaan minyak kelapa sawit untuk kepentingan industri, makanan, kosmetik dan lainnya diproyeksikan akan tetap meningkat** (lihat Gambar 3). Bahkan tanpa adanya tambahan permintaan untuk biodiesel, permintaan global akan minyak kelapa sawit diperkirakan akan terus meningkat.
17. Selain itu, ada pula **efek substitusi**. Naiknya permintaan dan harga *rapeseed oil* di UE akibat permintaan biodiesel ternyata berimbas pada meningkatnya suplai minyak kelapa sawit ke UE untuk menggantikan penggunaan *rapeseed* di sektor pangan. Jadi, karena proposal revisi Arahan Energi Terbarukan UE ini tidak menihilkan penggunaan *rapeseed oil* untuk biodiesel, **permintaan minyak kelapa sawit untuk keperluan selain bahan bakar diperkirakan masih akan meningkat akibat efek**

²⁵ Chris Malins, “Driving Deforestation,” Rainforest Foundation Norway dan Cerulogy, Januari 2018.

substitusi²⁶ meskipun produksi biodiesel dan bioliquid dari minyak kelapa sawit di UE mungkin menurun.



Gambar 3. Perkiraan Konsumsi Minyak kelapa sawit untuk Pangan dan Bahan Bakar

Sumber: RFN & Cerulogy, 2018

18. Satu hal lagi, kebijakan biodiesel Indonesia (B20 pada 2020 dan B30 pada 2030) pun diproyeksikan akan meningkatkan permintaan langsung terhadap minyak kelapa sawit secara besar-besaran apabila terpenuhi sepenuhnya (lihat tabel di bawah ini) sehingga dengan atau tanpa kebijakan UE, permintaan domestik akan minyak kelapa sawit diperkirakan akan meningkat.

Tabel 1. Skenario untuk permintaan minyak sawit langsung untuk feedstock biofuel

Permintaan dalam jutaan ton	2020			2025			2030		
	Rendah*	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Indonesia	2.5	4	12.9	4	6.9	15.9	5.5	12.2	18.6
Malaysia	0.7	1.2	1.8	0.9	1.5	2.4	1.0	1.8	3.6
Thailand	1.2	1.3	2.5	1.3	1.6	3.3	1.5	1.9	4.3
UE	2.9	3.1	3.3	1.3	2.5	3.7	0.9	2.2	4.1
Norwegia	0.1	0.1	0.2	0	0.1	0.2	0	0.1	0.3
Swedia	0.1	0.1	0.2	1.5	0	0.7	1.4	0	0.7
Denmark	0.1	0.1	0.2	1.0	0	0	4.0	0	0
Penerbangan	0.1	0.2	0.4	0.1	0.8	1.3	0.1	5.4	11.6
Total	8.2	10.9	23.6	7.6	14.1	32.2	9	24.3	53.6

²⁶ Lihat "How Rapeseed and Soy Biodiesel Drive Palm Oil Expansion," July 2017, ICCT, https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Oil-palm-expansion_ICCT-Briefing_27072017_vF.pdf. Diakses 12 Mei 2018.

Apa dampaknya terhadap ekspor CPO Indonesia?

19. Pendapatan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia pada tahun 2017 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah ekspor minyak kelapa sawit negeri ini, yakni USD 22,97 miliar dengan volume 31 juta ton atau 75% dari total produksi²⁷. Negara tujuan ekspor utama minyak kelapa sawit Indonesia saat ini adalah India, China, Pakistan, Banglades, AS, Uni Eropa, dan Afrika. Bagi Indonesia, UE bukan lagi pasar terbesar untuk ekspor CPO dan produk-produk turunannya, meski tetap penting. Sebaliknya, bagi UE, Indonesia adalah negara pemasok minyak kelapa sawit terbesar ke wilayah mereka, yang tercermin dari pangsa pasar CPO Indonesia di UE yang mencapai 80% (sisanya dari Malaysia)²⁸. Terlepas dari Resolusi Parlemen Eropa 2017 dan proposal Komisi Eropa serta Parlemen Eropa untuk merevisi Arahan Energi Terbaru pada Januari 2018, **impor minyak kelapa sawit UE dari Indonesia justru meningkat 27% dibandingkan tahun sebelumnya**²⁹. Menurut GAPKI, trend positif ini diakibatkan oleh elastisnya permintaan impor CPO UE dari Indonesia dalam jangka pendek karena harga CPO yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lainnya, faktor *excess demand* di mana produksi minyak nabati domestik UE hanya mampu memenuhi dua per tiga dari konsumsi domestiknya, suplai CPO yang lebih banyak di pasar global, dan dukungan lobi internasional pemerintah dan dalam isu keberlanjutan³⁰. Karena permintaan akan minyak kelapa sawit dari sektor pangan dan industri diperkirakan terus meningkat, maka usulan revisi RED Parlemen Eropa tidak akan sampai menurunkan permintaan global akan minyak sawit, melainkan hanya menurunkan potensi pertumbuhan permintaan akan minyak sawit yang diperkirakan naik besar-besaran akibat kebijakan biofuel global.

Apa kemungkinan dampak Arahan ini terhadap petani sawit skala kecil di Indonesia?

20. Belum ada data yang pasti mengenai jumlah petani sawit skala kecil di Indonesia. Petani skala kecil diperkirakan mengelola lahan seluas 4,4 juta hektar (perusahaan swasta besar mengelola 10,7 juta hektar dan BUMN 493 ribu hektar)³¹. Karena Arahan ini sama sekali tidak melarang penggunaan minyak kelapa sawit di UE, **petani sawit skala kecil dapat terus memproduksi TBS dan minyak kelapa sawit untuk makanan dan industri yang permintaannya diperkirakan akan terus meningkat, baik di UE maupun secara global**. Untuk menghindari ekspansi yang dapat mengganggu keberlanjutan industri sawit dalam jangka panjang, semua pemangku kepentingan harus segera mengambil langkah-langkah nyata untuk meningkatkan produktivitas petani kecil agar bisa mencapai potensi optimal sebesar 8-9 juta ton CPO/ha dan juga membantu petani kecil untuk mendapatkan legalitas usaha dan memenuhi standar keberlanjutan, baik standar Indonesia (ISPO) maupun standar internasional.
21. Saat ini, harga CPO di pasar internasional bukanlah satu-satunya penentu harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Beberapa faktor penentu harga lainnya adalah persentase rendeman minyak sawit kasar (CPO), harga rata-rata inti sawit, persentase rendeman inti sawit, dan sebuah indeks yang ditentukan oleh Gubernur atas dasar usulan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS yang disebut sebagai Indeks

²⁷ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/172547126/pada-2017-ekspor-minyak-sawit-indonesia-mencapai-rekor-tertinggi-sepanjang>. Diakses 12 Mei 2018.

²⁸ <https://gapki.id/news/4268/analisis-ekspor-cpo-indonesia-ke-uni-eropa-faktor-apa-yang-mendorong-trend-positif>. Diakses 8 Mei 2018.

²⁹ https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/37340/palm-oil-facts-and-figures-sustainability-and-trade_en. Diakses 8 Mei 2018.

³⁰ <https://gapki.id/news/4268/analisis-ekspor-cpo-indonesia-ke-uni-eropa-faktor-apa-yang-mendorong-trend-positif>. Diakses 12 Mei 2018.

³¹ KPK, Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit, 2016.

K.³² Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai bahwa aturan sistem Indeks K-lah yang menjadi faktor utama rendahnya harga TBS di tingkat petani selama ini.³³

Apa potensi dampak kebijakan biofuel terhadap deforestasi?

22. Kebijakan *biofuel* berbagai negara yang ada saat ini, apabila disatukan, diperkirakan akan meningkatkan permintaan langsung akan minyak kelapa sawit sebesar **67 juta ton** (dalam skenario tinggi) dan dengan demikian meningkatkan tekanan terhadap lahan. Laporan '*Driving Deforestation*' memperkirakan bahwa kenaikan permintaan ini akan mendorong deforestasi tambahan dalam skenario tinggi sebesar **4,5 juta hektar, termasuk pengeringan dan deforestasi lahan gambut sebesar 2,9 juta hektar**, yang kemudian meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Di Indonesia sendiri, berdasarkan studi *World Resources Institute* (2017), sekitar 1,6 juta hektar hutan primer Indonesia telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit³⁴. Selain itu, menurut temuan KPK tentang sistem pengelolaan kelapa sawit Indonesia (2016), dari 15,6 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang telah dibuka di Indonesia, sekitar 801 ribu hektar HGU berada di kubah gambut³⁵.
23. Tidak hanya UE, Indonesia pun berkepentingan untuk mencapai target penurunan emisinya sebesar 29%-41% dari skenario BAU pada 2030. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai target tersebut adalah menahan ekspansi perkebunan ke hutan alam dan lahan gambut serta merestorasi gambut yang sudah terlanjur rusak. Untuk mencegah inkonsistensi kebijakan, kebijakan energi terbaru Indonesia pun harus diharmoniskan dengan target pengurangan emisi ini. Kebijakan *biofuel* Indonesia saat ini, yang juga telah dicantumkan sebagai salah satu aksi mitigasi di dalam NDC, berpotensi menaikkan permintaan minyak sawit sebesar 5,5 hingga 18,6 juta ton pada 2030 (skenario rendah hingga tinggi) sehingga berpotensi menaikkan tekanan terhadap lahan apabila tidak ada perubahan mendasar dalam tata kelola lahan³⁶.
24. Saat ini, Indonesia dalam proses pengesahan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Izin Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (moratorium sawit)³⁷ untuk menekan laju ekspansi. Menurut penelitian yang dilakukan Mosnier dkk, komitmen terhadap *zero deforestation* dan moratorium ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat menurunkan deforestasi kumulatif sebesar 25-28% dibandingkan dengan situasi tanpa kebijakan, ditambah dengan penurunan emisi gas rumah kaca dari *land use* dan *land-use change* sebesar 13-16% selama periode 2010-2030³⁸. Akan tetapi, nasib dari kebijakan ini pun masih terkatung-katung selama lebih dari 2 tahun sejak kebijakan ini diumumkan secara lisan oleh Presiden Joko Widodo.

Beberapa pekerjaan rumah yang penting untuk mewujudkan sawit berkelanjutan

25. **Kajian KPK** tentang sistem pengelolaan kelapa sawit yang dilakukan pada tahun 2016 telah mengidentifikasi tiga permasalahan tata kelola domestik yang harus dibenahi segera yaitu: (i) Sistem pengendalian usaha perkebunan tidak akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, (ii) Tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit, dan (iii) Tidak optimalnya pungutan pajak sektor

³² Pedoman Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebun.

³³ <https://www.wartaekonomi.co.id/read112229/spks-lewat-permentan-pemerintah-legalkan-praktik-ketidakadilan.html>. Diakses 2 Juni 2018.

³⁴ <https://wri-indonesia.org/id/blog/satu-dekade-deforestasi-di-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-area-konsesi>. Diakses 12 Mei 2018.

³⁵ KPK, Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit, 2016.

³⁶ KPK, Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit, 2016.

³⁷ <https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2018/01/23/inpres-moratorium-disiapkan/> Diakses 31 Mei 2018

³⁸ Mosnier, Aline, dkk. *Palm oil and likely futures: Assessing the potential impacts of zero deforestation commitments and a moratorium on large-scale oil palm plantations in Indonesia*. CIFOR infobriefs. May 2017

- kelapa sawit oleh Dirjen Pajak³⁹. Hal ini kemudian menyebabkan tumpang tindih perizinan, deforestasi, dan kerusakan lahan gambut.
26. Dalam konteks akuntabilitas usaha perkebunan, tantangan besar yang dihadapi adalah **lemahnya pendataan usaha perkebunan**. Belum jelasnya jumlah dan luasan riil perkebunan sawit di Indonesia serta ketidakterbukaan pemerintah terhadap data-data tersebut masih menyulitkan pengawasan dan pengendalian. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dalam laporan terakhirnya pada tahun 2017 menemukan bahwa permasalahan pencatatan dan pendataan petani swadaya (melalui surat tanda daftar budidaya -STDB) masih menjadi permasalahan besar pada tingkat tapak⁴⁰.
 27. Dalam konteks sosial, tantangan yang mengemuka adalah **tingginya ongkos sosial dan finansial dari konflik lahan**. Catatan CRU dan Daemeter menyebutkan bahwa rumah tangga yang memiliki kebun sawit atau mengikuti program inti-plasma menanggung biaya konflik lebih besar 51 juta rupiah per tahun per keluarga sedangkan rumah tangga yang tidak memiliki kebun sawit dan atau mengikuti program inti-plasma menanggung biaya konflik sebesar 32 juta rupiah per tahun per keluarga⁴¹.
 28. Dalam hal pengaturan sektor perkebunan, pekerjaan rumah yang utama adalah inkonsistensi antara UU dan peraturan pelaksanaan, termasuk UU Perkebunan dan UU PPLH dan belum selesainya penyusunan peraturan pelaksanaan yang dimandatkan UU. Sebagai contoh, dari 21 (dua puluh satu) materi muatan yang diperintahkan UU Perkebunan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah, baru 1 (satu) yang sudah ditetapkan. Padahal, 16 (enam belas) dari 21 (dua puluh satu) materi muatan tersebut telah ditetapkan pada 2017 lalu sebagai prioritas, termasuk tentang **pengembangan perkebunan berkelanjutan** dan **penilaian usaha perkebunan**⁴².
 29. Pekerjaan rumah yang tidak kalah menantang adalah **petani kecil**, yakni (i) produktivitas yang rendah, (ii) masih banyaknya petani kecil yang belum memiliki legalitas, (iii) masih sulitnya petani kecil memenuhi aspek keberlanjutan, (iv) akses terhadap permodalan yang masih sangat rendah. (v) minimnya sarana produksi, dan (vi) penjualan hasil perkebunan yang belum mendapatkan harga yang optimal⁴³.
 30. Terakhir, pekerjaan rumah yang juga sangat penting adalah pengembangan sektor hilir (**hilirisasi**). Indonesia baru dapat mengembangkan 40 jenis produk turunan CPO sedangkan Malaysia telah berhasil mengembangkan 100 jenis turunan CPO⁴⁴. Dengan demikian, potensi untuk mengembangkan industri hilir sangat besar dan lebih dibutuhkan ketimbang berfokus pada ekspansi lahan yang berisiko meningkatkan konflik dan kerusakan lingkungan hidup yang dalam jangka panjang justru mengancam keberlanjutan industri kelapa sawit itu sendiri.

³⁹ Kontribusi penerimaan pajak sektor kelapa sawit tahun 2015 hanya 2,1% dari total penerimaan pajak negara. Lihat KPK, Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit, 2016.

⁴⁰ SPKS, 2017, Petani Swadaya Kelapa Sawit Indonesia: Keterbatasan Definisi, Kesenjangan dan Tantangan.

⁴¹ Virginia Barreiro et al, 2016, "The Cost of Conflict in Oil Palm in Indonesia," CRU, Daemeter.

⁴² Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017.

⁴³ SPKS, 2017, Petani Swadaya Kelapa Sawit Indonesia: Keterbatasan Definisi, Kesenjangan dan Tantangan.

⁴⁴ Kementerian Perindustrian (2011) dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan.

Digagas bersama dan didukung oleh:



Tim Penyusun:

1. Anggalia Putri Permatasari (Yayasan Madani Berkelanjutan), anggalia.putri@madaniberkelanjutan.id
2. Teguh Surya (Yayasan Madani Berkelanjutan), teguh.surya@madaniberkelanjutan.id
3. Giorgio Budi Indarto (Spesialis Kebijakan Hutan dan Perkelapasawitan), giorgio.gbi@gmail.com
4. Abimanyu Sasongko Aji (Kemitraan), abimanyu.aji@kemitraan.or.id
5. Isna Fatimah (Indonesian Center for Environmental Law/ICEL), isna@icel.or.id
6. Mardi Minangsari (Kaoem Telapak), minangsari@gmail.com
7. Kania Mezariani (Institute for Policy Research and Advocacy/ELSAM), kania@elsam.or.id

Referensi

DATABASE DARING

Barreiro, Virginia, et.al. (2016). *The Cost of Conflict in Oil Palm in Indonesia*. Diakses pada 8 Mei 2018, dalam Daemeter:

http://daemeter.org/new/uploads/20170121193336.The_Cost_of_Conflict_in_Oil_Palm_Indonesia_.pdf

Bourguignon, Didier. Januari 2015. *Briefing: EU Biofuels Policy – Dealing with Indirect Land Use Change*. Diakses pada 8 Mei 2018, dalam European Parliament:

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545726/EPRS_BRI\(2015\)545726_REV1_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545726/EPRS_BRI(2015)545726_REV1_EN.pdf)

Climate Action Network Europe. February 2018. *All You Need to Know About the Last Phase of the Renewable Energy Directive Negotiations*. Diakses pada 7 Juni 2018, dalam Climate Action Network Eropa: <http://www.caneurope.org/publications/blogs/1553-all-you-need-to-know-about-the-last-phase-of-the-renewable-energy-directive-negotiations>.

Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam. (2018, Januari 24). *Palm Oil: Facts and Figures on Sustainability and Trade*. Diakses pada 8 Mei 2018, dalam European External Action Services: https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/37340/palm-oil-facts-and-figures-sustainability-and-trade_en

Energy Information Administration. (2017, Mei 16). *Biomass- Renewable Energy From Plants and Animals*. Diakses pada 7 Mei 2018, dalam EIA:

https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=biomass_home

European Commission. (n.d.) *Biofuel - Sustainability Criteria*. Diakses dalam 8 Mei 2018, dalam European Commission: <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/sustainability-criteria>

_____. (n.d.) *Biofuel- Land Use Change*. Diakses pada 8 Mei 2018, dalam European Commission: <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/land-use-change>

European Parliament. (2015, April 28). *Press Release: Parliament Supports Shift Towards Advanced Biofuels*. Diakses dalam 8 Mei 2018, pada European Parliament: http://climateobserver.org/wp-content/uploads/2015/04/EP_press-release-on-biofuels-2015.pdf.

_____. (2018, Januari 17). *Amendments Adopted By The European Parliament on 17 January 2018 on The Proposal For a Directive of The European Parliament And of The Council on The Promotion of the Use Of Energy From Renewable Sources*. Diakses pada 7 Mei 2018, dalam European Parliament: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0009>.

_____. (n.d.) *2016/0382(COD) - 17/01/2018 Text Adopted by Parliament, Partial Vote at 1st Reading/Single Reading*. Diakses pada 5 Mei 2018, dalam European Parliament – Legislative Observatory: <http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1519347&t=e&l=en>.

European Union. (2018, April 24). *Fact Sheet - Palm Oil: Facts & Figures on Sustainability and Trade*. Diakses dalam 7 Mei 2018, pada European External Action Services:

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20180424_palm_oil_fact_sheet_en.pdf.

_____. (n.d.) *Renewable Energy Directive*. Diakses pada 5 Mei 2018, dalam European Commission: <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive>.

European Union. (n.d) *Infringement Procedure*. Diakses pada 5 Mei 2018, dalam European Union: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_en

GAPKI. (2018, Februari 8). *Analisis Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa: Faktor Apa yang Mendorong Tren Positif?*. Diakses pada 8 dan 12 Mei 2018, dalam GAPKI: <https://gapki.id/news/4268/analisis-ekspor-cpo-indonesia-ke-uni-eropa-faktor-apa-yang-mendorong-trend-positif>

Globiom. (n.d.) *The New Basis for EU Biofuel Policy 2021-2030*. Diakses pada 8 Mei 2018, dalam Transport & Environment:

<https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016%2004%20Globiom%20webinar.pdf>

Guarierro, Lilian Lefol & Guarierro, Aline Lefol Nani. 2013. *Vehicle Emissions: What Will Change with Use of Biofuel? In Biofuels – Economy, Environment and Sustainability*, pp. 357 – 386. Diakses pada 8 Mei 2018, dalam INTECHOPEN: http://cdn.intechopen.com/pdfs/42164/InTech-Vehicle_emissions_what_will_change_with_use_of_biofuel_.pdf

ICCT. (2017, July). *How Rapeseed and Soy Biodiesel Drive Palm Oil Expansion*. Diakses pada 12 Mei 2018, dalam ICCT: https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Oil-palm-expansion_ICCT-Briefing_27072017_vF.pdf.

ICCT. (2017, January). The European Commission 's Renewable Energy Proposal for 2030. Diakses pada 7 Juni 2018, dalam ICCT: https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/RED%20II_ICCT_Policy-Update_vF_jan2017.pdf.

Konsorsium Pembaruan Agraria. 2017. *KPA Launching Catatan Akhir Tahun KPA*. Diakses pada 24 Mei 2018, dalam KPA: <https://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2017/>.

Pusaka (2018. 31 Mei). Surat Terbuka kepada Presiden, Dewan Uni Eropa, dan Kepala Negara Uni Eropa, diakses dalam <http://pusaka.or.id/2018/05/ratusan-pimpinan-organisasi-mengirimkan-surat-terbuka-kepada-presiden-ri-dan-presiden-dewan-uni-eropa-menyikapi-dampak-usaha-perkebunan-kelapa-sawit/>.

Reuters. (2018, Januari 18). *European Move to Ban Palm Oil from 'Crop-Apartheid' -Malaysia*. Diakses pada 30 April 2018, dalam Reuters: <https://www.reuters.com/article/malaysia-palmoil-eu/european-move-to-ban-palm-oil-from-bahan-bakar-hayatis-is-crop-apartheid-malaysia-idUSL3N1PD1NJ> .

Toedt, William. (2018, Maret 1). *Will EU Call Palm Oil Nations' Bluff?* Diakses pada 8 Mei 2018, dalam Transport & Environment: <https://www.transportenvironment.org/newsroom/blog/will-eu-call-palm-oil-nations%E2%80%99-bluff>

Transport & Environment. (n.d.) *Cars and Trucks Burn Almost Half All Palm Oil Used Europe*. Diakses pada 8 Mei 2018, dalam Transport & Environment: <https://www.transportenvironment.org/press/cars-and-trucks-burn-almost-half-all-palm-oil-used-europe>

United States of Agriculture. (n.d.) *European Union (EU-27) Palm Oil Imports by Year*. Diakses pada 8 Mei 2018, dalam Index Mundi: <https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eu&commodity=palm-oil&graph=imports>.

Wijaya, Arief, et.al. (2017, Juli 19). *Satu Dekade Deforestasi di Indonesia, di Dalam dan di Luar Area Koneksi*. Diakses pada 12 Mei 2018, dalam WRI Indonesia: <https://wri-indonesia.org/id/blog/satu-dekade-deforestasi-di-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-area-koneksi>.

LAPORAN

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit*. Jakarta: KPK.

Malins, Chris. (January, 2018). *Driving Deforestation*. Oslo: Rainforest Foundation Norway and Cerulogy.

SPKS. (2017). *Petani Swadaya Kelapa Sawit Indonesia: Keterbatasan Definisi, Kesenjangan dan Tantangan*. Bogor: SPKS

MEDIA DARING

----- (2018, 5 September). SPKS: Lewat Permentan, Pemerintah Legalkan Praktik Ketidakadilan. Diakses 2 Juni 2018 dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read112229/spks-lewat-permentan-pemerintah-legalkan-praktik-ketidakadilan.html>.

Azzura, Siti Nur. (2018, 12 April). *Imbas pelarangan CPO, Lion Air Group boikot impor ratusan Airbus*. Diakses 12 April 2018 dalam <https://www.merdeka.com/uang/imbas-pelarangan-cpo-lion-air-group-boikot-impor-ratusan-airbus.html>

Chandra, Ardan Adhi. (2018, 20 Maret). *Norwegia Setop Biofuel dari Sawit, RI Ancam Tak Impor Ikan Salmon*. Diakses 20 Maret 2018 dalam <https://finance.detik.com/industri/d-3927728/norwegia-setop-biofuel-dari-sawit-ri-ancam-tak-impor-ikan-salmon>

Fauzi, Achmad. (2018, 26 Januari). *Asosiasi Petani: Lawan Uni Eropa dengan Boikot dan Stop Ekspor CPO*. Diakses 26 Januari 2018 dalam

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/26/174000626/asosiasi-petani--lawan-uni-eropa-dengan-boikot-dan-stop-ekspor-cpo>.

Gumelar, Galih. (2018, 9 Mei). Resolusi Sawit Uni Eropa Disinyalir Karena Persaingan Dagang. Diakses 9 Mei 2018 dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170509135906-92-213466/resolusi-sawit-uni-eropa-disinyalir-karena-persaingan-dagang>.

Nababan, Christine Novita. (2018, 11 April). Balas Larangan Impor CPO, JK Ancam Setop Beli Airbus. Diakses 11 April 2018 dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180411170733-92-290102/balas-larangan-impor-cpo-jk-ancam-setop-beli-airbus>.

Pratiwi, Priska Sari. (2018, 9 April). RI Ancam Balas Pelarangan Impor CPO Uni Eropa. Diakses 11 April 2018 dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180409135954-92-289446/ri-ancam-balas-pelarangan-impor-cpo-uni-eropa>

Reuters Staff. (2018, 18 Januari). European move to ban palm oil from biofuels is 'crop apartheid' - Malaysia. Diakses pada 30 April 2018 dalam <https://www.reuters.com/article/malaysia-palmoil-eu/european-move-to-ban-palm-oil-from-bahan-bakar-hayatis-is-crop-apartheid-malaysia-idUSL3N1PD1NJ>.

Santi, Natalina. (2018, 15 Januari). Eropa akan Hapus Biodiesel dari Sawit Termasuk dari Indonesia. Diakses 15 Januari 2018 dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180115060231-134-268799/eropa-akan-hapus-biodiesel-dari-sawit-termasuk-dari-indonesia>.

Setiawan, Sakina Rakhma Diah. (2018, 30 Januari). *Pada 2017, Ekspor Minyak Sawit Indonesia Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah*. Diakses pada 12 Mei dalam Kompas: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/172547126/pada-2017-ekspor-minyak-sawit-indonesia-mencapai-rekor-tertinggi-sepanjang>

Simorangkir, Eduardo. (2018, 19 Maret). Sawit RI Dicekal AS hingga Eropa, Ketua DPR Minta Kemendag Lawan. Diakses 19 Maret 2018 dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3924768/sawit-ri-dicekal-as-hingga-eropa-ketua-dpr-minta-kemendag-lawan>.